

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pada dasarnya kebijakan Rusia terhadap Iran dalam kerjasama program reactor nuklir menjadi suatu hal yang sangat menantang untuk dijadikan pengkajian dan analisa lebih lanjut. Dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan terkait kebijakan Rusia dalam kerjasama program nuklir Iran yaitu dengan judul “Kebijakan Rusia Terhadap Iran Dalam Kerjasama Program Reaktor Nuklir Tahun 1995-2005”. Topik permasalahan ini dapat dikatakan fluktuatif, terkadang memburuk dan terkadang dingin.

Alasan penulis mengangkat judul ini adalah adanya hubungan yang bermula sudah sejak lama antara Rusia dengan Iran. Hubungan yang dibentuk kedua Negara menghasilkan beberapa kerjasama yang saling menguntungkan. Selain itu kerjasama ini juga mempengaruhi hubungan dengan Negara-negara lain dalam bidang keamanan dan militer, seperti Rusia, Iran, Amerika Serikat dan Israel. Misalnya hubungan antara Negara Rusia dengan Iran, hubungan antara Rusia dengan Amerika ataupun hubungan antara Amerika dan Israel dengan Iran.

Umumnya kebijakan Rusia terhadap Iran dalam kerjasama program reactor nuklir menjadi sebuah polemik yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut bagaimana kebijakan Rusia dalam kerjasama program reactor nuklir Iran.

B. Latar Belakang Masalah

Rusia adalah sebuah negeri besar. Kelahiran Rusia sebagai pewaris garis politik Uni Soviet, dan beberapa republik Soviet lainnya sesungguhnya terjadi beberapa bulan sebelum kematian Uni Soviet. Federasi Rusia lahir dari integrasi yang terjadi di Uni Soviet, dimana Uni Soviet

adalah negara yang berideologi komunis telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan federasi Rusia. Namun, dengan berjalannya waktu federasi Rusia berusaha mengubah sistem pemerintahan yang otoriter menuju kearah yang lebih demokratis.

Identitas Rusia pada mulanya dipimpin oleh Knyas kemudian beralih menjadi Tsar. Pada masa inilah struktur pemerintahan Rusia mulai terbentuk. Pemerintahan Imperium Rusia Raya (Tsar) bersifat otokrasi, otoriter dan terpusat. Setelah masa Imperium Tsar runtuh kemudian digantikan dengan terbentuknya Uni Soviet (USSR) sebagai sebuah negara yang terbentuk dari ide dibangunnya masyarakat sosialis. Uni Soviet menempatkan ide komunisme dan Partai Komunis pada posisi yang sangat sentral. Akibatnya, sistem politik yang monopartai dianggap sebagai suatu keharusan. Hal ini membawa konsekuensi pada tumpang tindihnya urusan pemerintahan dan urusan partai.

Kemudian munculah berbagai masalah dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya baik masalah politik maupun ekonomi, serta mengalami beberapa peristiwa yang kemudian membawa kondisi Rusia semakin memprihatinkan. Kemerosotan ekonomi akibat korupsi dan bobroknya birokrasi serta budaya politik yang makin monolitik semakin memperkuat apatisme masyarakat. Melihat kondisi itu, Mikhail Gorbachev, tokoh paling muda yang pernah memimpin partai komunis dalam sejarah Uni Soviet, membuat gagasan pembaruan yakni ada tiga konsep pembaruan: Glasnost, Perestroika, dan Demokratizatsiya sebagai usaha pembaharuan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik Uni Soviet. ¹Usaha Gorbachev untuk memperbaiki di segala bidang demi tercapainya masyarakat Uni Soviet yang lebih baik, ternyata mendapat berbagai protes di Uni Soviet dan pada akhirnya perubahan itu memunculkan elit-elit pemerintahan yang disebut kelompok reformis yang ingin menciptakan demokratisasi. Bangsa itu hanya mengetahui

¹Padma Desai, *Perestroika Dalam Perspektif : strategi dan dilema Gorbachev*, (cet. 1, Jakarta; Grafiti, 1990)

bahwa melalui demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat kepada masyarakat, maka peningkatan kesejahteraan kehidupan akan lebih mudah tercapai tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana cara menggerakkan ekonomi dalam suasana demokratis. Ketidakmampuan Gorbachev dengan tiga konsep pembaruannya itu untuk mewujudkan kondisi Uni Soviet yang lebih baik, akhirnya pada tanggal 24 Desember 1991 Mikhail Gorbachev secara resmi mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet, gagal dengan gagasannya, dan secara otomatis mengakhiri eksistensi Uni Soviet.

Uni Soviet runtuh, menyisakan kepingan-kepingan negara-negara berdaulat. RSFSR (Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia) yang kemudian menjadi Federasi Rusia adalah kepingan terbesar bekas negara adikuasa tersebut, yang sekaligus memiliki hak sebagai pewaris kebesaran Uni Soviet. Namun demikian pecahnya Uni Soviet meninggalkan beberapa persoalan krusial yang harus segera diatasi demi keberlangsungan perikehidupan masyarakat dan peradaban bangsa Rusia. Presiden pertama yang memimpin Federasi Rusia adalah Boris Nikolayevich Yeltsin. Pada masa Boris Yeltsin, demokratisasi yang merupakan pilar perestroika dilanjutkan pada masa pasca-komunis ini. Yeltsin melanjutkan cita-cita dan harapan Gorbachev dengan upaya menciptakan Rusia yang lebih demokratis. Yeltsin mengakhiri masa jabatannya sebelum masa tugasnya yang kedua berakhir. Pada saat ia mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 31 Desember 1999, ia menunjukkan Vladimir Putin yang saat itu sebagai PM untuk menjadi acting Presiden sekaligus mengumumkan sebagai 'putra mahkota' yang akan memimpin Rusia selanjutnya. Konstitusi tahun 1993 mengatakan bahwa Rusia merupakan Negara demokratik, federatif dan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang dengan bentuk pemerintahan republik. Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu Eksekutif, Legislative dan Yudikatif. Kebinekaan ideology, agama diperkenankan, sedangkan ideology negara yang bersifat

memaksa sudah tidak berlaku lagi. Hak untuk mengadopsi system politik multi partai dijunjung tinggi. Jadi, system politik Rusia adalah system politik multi partai sejak dipilihnya model demokrasi perancis.²

Pasca hancurnya Uni Soviet, Rusia, Belarus dan Ukraina mempelopori dibentuknya CIS (*Commonwealth of Independent State/Persemakmuran Negara Independen*) ditandai dengan penandatanganan Alma-Ata Protocol oleh 8 negara bekas Uni Soviet lain yaitu Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgystan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan dan Uzbekistan. Tiga negara Baltik, Estonia, Latvia dan Lithuania memilih untuk tidak bergabung. Sementara Georgia, sempat masuk ke CIS pada tahun 1993 namun tidak lagi menjadi bagian CIS saat keluar di tahun 2008. CIS pada awalnya ditujukan untuk lebih menjadi organisasi simbolis.

CIS menjadi organisasi yang memiliki kekuatan koordinasi di bidang dibidang perdagangan, keuangan, hukum, dan keamanan. Selain juga sebagai kerjasama dalam pencegahan kriminalitas lintas batas negara. Dengan catatan, CIS merupakan bentukan serikat baru dengan hubungan yang lebih longgar yang menjamin kedaulatan masing-masing negara. Negara-negara CIS tersebut bersama-sama telah merencanakan untuk mempunyai suatu pasar bebas. Banyak negara CIS yang juga mentransformasikan sistem ekonominya dengan kapitalis. Perdagangan antara negara-negara CIS ini merupakan langkah membenahi perekonomian yang hancur pasca disintegrasi Uni Soviet.

Setelah CIS, banyak muncul organisasi regional di negara-negara Uni Soviet terutama intergrasi perdagangan bebas, misalnya antara negara-negara Baltik (Estonia, Latvia dan Lithuania), EurAseC (*Eurasian Economic Community*), OCAC (*Organization of Central Asian Cooperation*), CSTO (*Collective Security Treaty Organization*), CU, CES dan beberapa

²Fahrurroddi, A., *Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar –belakang Budayanya*; (Pengantar: Rachmat Witoelar, edisi 1. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia 2005), h.203

kerjasama regional lain. Tiga serangkai Rusia, Belarus dan Kazakhstan juga pernah menjadi inisiator pembentukan *CIS Economic Union* pada 1994 dan *Interstate Economic Committee* pada 1997. Serikat ini merencanakan sebuah badan supra nasional. Namun tujuan utama berupa ruang pabean tidak tercapai. CIS juga pernah mengadakan perjanjian perdagangan bebas pada 1994 yang diamandemen pada 1999. Rusia menjadi satu-satunya Negara yang tidak meratifikasi perjanjian tersebut sehingga pasar bebas pun sulit untuk diimplementasikan³. Putin memandang CIS sebagai mitra tradisional Rusia dan ia terus mencoba membangun hubungan bilateral dan regional dengan negara-negara CIS dalam berbagai kerjasama strategis. Kerjasama strategis ini banyak diciptakan dalam bidang perdagangan, terutama gas dan minyak bumi. Putin merevisi konsep kebijakan luar negeri Yeltsin yang pernah disahkan pada tahun 1993. Konsep kebijakan luar negeri yang baru menyatakan bahwa CIS merupakan prioritas utama kebijakan luar negeri Rusia.⁴

Hubungan Rusia dengan Iran sudah terjalin sejak lama. Iran merupakan salah satu negara tertua di dunia. Dan seiring dengan berjalannya sejarah panjang ini, Iran telah mengalami berbagai invasi dan dijajah oleh negara asing. Pada tahun 1826 Rusia menginvasi Iran. Penguasa Tsar Rusia ingin memperlebar daerah kekuasaannya dan memperoleh jalur penghubung ke Teluk Persia. Bangsa Rusia memberikan kekalahan yang hebat atas Iran pada tahun 1827, yang kemudian sesudah itu dua negara tersebut menandatangani traktat Turkomanchai. Perjanjian ini memberi penguasa Tsar Rusia wilayah bagian utara sungai Aras, yang sampai sekarang masih menjadi perbatasan antara dua negeri itu. Di tahun 1856 Iran mencoba untuk mendapatkan kembali bekas teritorinya di barat laut Afghanistan, tetapi imperialis Inggris menyatakan perang terhadap Iran. Dan pada tahun 1857 Iran dipaksa untuk menandatangani traktat yang

³Hoffmann, Katharina, *Eurasian Union, a New Name for an Old Integration Idea*, "Russian Analytical Digest" No. 112

⁴Varma, *Teori Politik Modern*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001

menyerahkan semua klaim terhadap Afghanistan. Pengaruh imperialisme Inggris dan kekaisaran Rusia di Iran semakin meningkat sepanjang akhir pertengahan abad ke-19, dan pada permulaan tahun 1900, sebuah Korporasi Inggris, Perusahaan Minyak Anglo-Persian, mulai mengambil alih kendali atas ladang minyak di Iran barat daya.

Selama masa Perang Dunia 1, Iran menjadi ajang pertempuran meskipun negara tersebut bersikap netral. Ketersaran Rusia tertarik untuk mempertahankan cadangan minyak di Baku dan Laut Kaspia. Bangsa Rusia terlibat dalam pertempuran sengit dengan bangsa Turki di Iran barat laut. Imperialis Inggris, di pihaknya, mempertahankan kepentingan mereka di ladang minyak Khuzistan.

Pada saat Perang Dunia II dimulai tahun 1939, Iran sekali lagi menyatakan kenetralannya. Di akhir tahun 1930 lebih dari separuh perdagangan luar negeri Iran adalah dengan Jerman yang menyediakan mayoritas permesinan untuk program industrialisasi Iran. Dia dengan demikian menolak untuk bekerja sama, dan maka pada tahun 1941 imperialis Inggris dan Rusia-Stalin menginvasi Iran. Mereka memaksa Shah Reza untuk mengundurkan diri, menempatkan putranya Muhammad Reza Pahlevi sebagai penggantinya. Sekali lagi pada tahun 1960-1961 krisis politik dan ekonomi kembali mengemuka, ketika pemilihan majelis dimanipulasi besar-besaran. Kekacauan politik dan ekonomi menimbulkan sebuah pemogokan umum yang secara brutal ditindas dengan pertolongan agen polisi rahasia yang kejam, Savak. Shah memperkenalkan apa yang disebut dengan program "Revolusi Putih," program reformasi agraria yang dikombinasikan dengan langkah-langkah pendidikan dan kesehatan. Dari tahun 1963-1973 secara politik dan ekonomi Iran relatif stabil.

Kerjasama program nuklir Rusia-Iran terjadi saat sudah ada perjanjian NPT (*Non-Proliferation Treaty*) dan ada penentangan dari negara-negara lain. Pada tahun 1990 sebelum

Perang Dingin usai, Uni Soviet memulai dialog dengan Iran mengenai kemungkinan penyelesaian proses pembangunan reaktor Bushehr yang belum selesai sekaligus memasok kebutuhan peralatan lainnya terkait reaktor tersebut. Proses dialog tersebut dilanjutkan kembali setelah Perang Dingin selesai pada Januari 1995, dimana Federasi Russia secara resmi menyatakan akan membantu Iran menyelesaikan proses pembangunan reaktor Bushehr, dan menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Iran mengenai kemungkinan pembangunan tiga reaktor serupa di lokasi yang sama. Semenjak ditandatanganinya kesepakatan kerjasama tersebut, Amerika Serikat secara berkelanjutan mulai memperlihatkan penolakan keras terhadap keberadaan reaktor Bushehr yang dikhawatirkan akan digunakan oleh Iran sebagai fasilitas pengembangan senjata pemusnah massal.⁵

Terlepas dari masalah-masalah teknis yang menghambat kerjasama tersebut, upaya Amerika Serikat untuk membatalkan semua perjanjian Iran terkait program nuklirnya melalui lobi intensif dan penekanan-penekanan membawa hasil pada pembatalan sejumlah perjanjian seperti, pembatalan perjanjian kerjasama dengan Argentina (pengayaan uranium dan fasilitas produksi air berat), kerjasama dengan China (reaktor produksi plutonium, dua reaktor energi dan fasilitas konversi uranium), dan termasuk kerjasama dengan Russia (reaktor air berat). Amerika Serikat khawatir bahwa rezim yang berkuasa melalui Revolusi Islam akan membawa instabilitas di wilayah Timur Tengah dan mengancam kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut, utamanya adalah yang berkaitan dengan sumber daya alam energi gas dan minyak, serta keberadaan Israel. Amerika Serikat juga beranggapan bahwa meskipun upaya-upaya lobi internasional berhasil membatalkan sejumlah kerjasama antara Iran dengan negara-negara pemasok kebutuhan program nuklirnya, Iran masih memiliki kemungkinan untuk menjalankan sebuah program nuklir klandestin bertujuan militer. Pertimbangan ini kemudian mendorong

⁵*ibid*

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi yang lebih luas kepada Iran dan melakukan pembatasan-pembatasan pada Russia dan negara.

Program nuklir Iran menjadi masalah yang diperdebatkan dalam politik internasional kontemporer oleh Amerika Serikat, Rusia, China, dan Eropa. Pengembangan nuklir di Iran mendapat protes keras dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Amerika Serikat menuduh Iran memiliki rencana membangun senjata nuklir sehingga Amerika Serikat menjatuhkan sanksi diplomatik maupun ekonomi terhadap Iran. Bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat, Rusia mengatakan bahwa pemberian sanksi tidak akan menyelesaikan masalah ataupun menghentikan ambisi Iran. Rusia justru mendukung dengan menyuplai Iran dengan teknologi senjata terbaru. Kebijakan luar negeri Rusia ini di luar kalkulasi geostrategi Rusia dan pertimbangan efisiensi ekonomi karena mereka tidak mempertimbangkan perubahan konsep geopolitik yang dimiliki Rusia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian latar belakang permasalahan di atas mendorong penulis untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Mengapa Rusia membuat kebijakan kerjasama nuklir terhadap Iran tahun 1995-2005?”

D. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab Rumusan Masalah diatas, maka penulis menggunakan konsep dan teori sebagai berikut:

1. Teori politik internasional

Politik internasional menurut Hans J. Morgenthau pada hakekatnya adalah merupakan “*a struggle for power*”.⁶ Para realis memandang negara sebagai unitary dan rasional. Realis menganggap bahwa negara merupakan kesatuan dan selalu bertindak secara rasional serta *prudence* atau berhati-hati dalam bertindak. Aspek terpentingnya merupakan bagaimana suatu negara yang dianggap sebagai aktor paling penting bagi para realis, mempertahankan keberadaannya (*survive*). Karena, negara akan melakukan apa saja dan akan mempertahankan mati-matian demi mendapatkan rasa aman bagi negara itu sendiri. Disamping itu, negara juga tidak memikirkan keadaan negara lain dan hanya mementingkan negaranya sendiri, inilah kondisi yang dinamakan *struggle of power*.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa negara merupakan aktor terpenting dan kekuasaan tertinggi hanya dikuasai oleh negara, maka kondisi tersebut merupakan berlakunya suatu sistem anarki. Selain itu, keberadaan prinsip moral universal tidak dianggap sebagai variabel signifikan didalam sistem politik internasional. Walaupun negara dianggap sebagai *state centric*, namun ada kalanya ketika kondisi dalam negeri tidak dianggap penting dan tidak dianggap menguntungkan bagi sistem internasional.

Menurut Morgenthau ada enam prinsip realisme , (1) realisme politik menganggap bahwapolitik, seperti masyarakat umumnya, dikendalikan oleh hukum-hukum objektif yang berakar pada hakikat manusia, (2) politik internasional merupakan wadah suatu negara dalam memenuhi *interest*-nya sebagai tujuan mendapatkan *power*, (3) bentuk dan sifat kekuasaan negara akan bermacam-macam (kontekstual) tetapi kepentingan nasional akan tetap sama, (4)

⁶Morgenthau Hans J. : “*Politic Among Nations*”, Yayasan Obor. Jakarta, 1990.

prinsip moral universal tidak menuntut sikap negara, (5) tidak ada prinsip moral universal, (6) secara intelektual politik itu otonom.

Tindakan yang diambil suatu negara didasarkan atas kepentingannya bukan berdasarkan prinsip moral. Konsep bahwa politik itu otonom karena menurut Morgenthau (2010, hlm : 5), 'politik sebagai lingkungan tindakan dan pengertian yang berdiri sendiri atau terpisah dari lingkungan lainnya seperti ilmu ekonomi (dipahami dalam arti kepentingan yang didefinisikan sebagai kekayaan, etika, estetika, atau agama').

Statism sama halnya dengan *state centric*, maka letak statism digambarkan berada diatas segitiga karena dianggap sebagai aktor utama. Kemudian *survive* seperti yang telah dijelaskan, negara akan membela mati-matian demi mendapatkan keamanan negaranya agar tetap bertahan. Oleh karena keamanan merupakan sebuah isu utama bagi suatu negara, maka hal tersebut digunakan sebagai 'alat' dalam meningkatkan *power* negara (*power gaining*). *Power* itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu *tangible power* dan *intangible power*. *Tangible power* digambarkan sebagai kekuatan fisik seperti halnya negara dengan SDA yang berlimpah, lokasi negara yang strategis, kaya akan sumber minyak dan gas, dll. Selain itu yang dimaksud dengan *intangible power* adalah kekuatan diluar fisik atau kasat mata seperti kekuatan diplomasi negara, kualitas pemerintahan suatu negara yang kuat, dll. Namun, besarnya *power* yang dimiliki belum tentu dapat dikatakan bahwa negara tersebut merupakan negara yang kuat. Sebaliknya, bila terdapat semisal negara A mampu mempengaruhi negara B untuk memenuhi suatu kepentingan negara A maka negara A dapat dikatakan sebagai negara yang kuat.

Self help dari gambaran realisme diatas pada dasarnya negara menolong dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas *survive*-nya negara tersebut serta bebas mendefinisikan dan memenuhi kepentingannya. Karena negara berhak menentukan segala sesuatunya sendiri sehingga

merupakan refleksi dari sistem anarki. Akibat akan hal ini dibutuhkan adanya ‘*balance of power*’⁷

2. *Balance of Power*

Konsep *balance of power* atau keseimbangan kekuasaan dipakai untuk menunjukkan hubungan kekuasaan, khususnya pada sistem negara Eropa mulai dari Perang Napoleon hingga Perang Dunia Pertama. Konsep-konsep yang terdapat pada studi hubungan internasional masih sering mengalami perdebatan, hal tersebut karena gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa dalam Hubungan Internasional selalu berubah sesuai perkembangan zaman. Namun, konsep *Balance of power* adalah konsep yang teramat sering didiskusikan. Sebagai akibatnya, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang berbeda oleh para pemikir mengenai konsep dari *Balance of power*. Melalui konsep ini, negara berusaha mempertahankan statusnya sebagai suatu entitas yang independen.

Realis tradisional memandang *balance of power* sebagai suatu cara, konsep, atau teori yang berpusat pada *power*. Hans Morgenthau dalam *International Politics* mengasumsikan *balance of power* sebagai suatu realita, dimana *power* dibagi sama rata atau dikendalikan bersama secara adil oleh sekelompok negara. Sekelompok negara tersebut tentunya memiliki keinginan untuk menghancurkan dan atau mempertahankan *status quo*. Menurut realis tradisional, tujuan utama dan mendasar dari sebuah *foreign policy* adalah untuk mendapatkan *power*, tidak terkecuali *Balance of power*. *Balance of power* menjadi satu-satunya alternative untuk mencegah suatu

⁷Morgenthau Hans J : “*Teori Realisme, suatu Analisis dan Kritik*”, Sebelas Maret University Press.

negara *great power* untuk memiliki power yang melimpah, yang dapat menimbulkan perasaan terancam oleh negara lain yang lebih lemah.⁸

Seperti hubungan Rusia dengan Iran dan Amerika. Keputusan penjualan Rudal kepada Iran dan hubungan erat Rusia dengan Iran dan Negara Timur Tengah akan membahayakan bagi Amerika. Rusia akan semakin memperluas pengaruhnya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan bangsa Rusia tanpa memperdulikan kepentingan Amerika pasca sanksi barat yang dijatuhkan kepada Rusia yang menyebabkan perekonomian Rusia terbengkalai. Sebagai Negara yang pernah menjadi *super power* dunia Rusia tentunya akan menerapkan *balance of power* untuk mengimbangi Amerika. Memperluas hubungan dan pengaruhnya di Timur Tengah merupakan prinsip dasar kesejahteraan nasional Rusia.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa *balance of power* dipandang sebagai sebuah “hasil” dalam level sistemik dan subsistemik dan juga sebagai suatu kondisi dalam keseimbangan kekuasaan—*power equilibrium*—antara “negara-negara kunci” (Paul, T.V. 2004; 2). Terdapat tiga konsep *balancing strategy* yakni: *Hard Balancing*, dalam mengimbangi lawan, negara yang menggunakan strategi ini akan membangun dan selalu memperbarui kekuatan militernya. Selain itu, negara juga membangun serta mempertahankan aliansi tandingannya untuk mengimbangi; *Soft Balancing*, berlangsung ketika negara-negara mengembangkan perjanjian diantara mereka untuk menyeimbangi negara potensial. Kemudian persaingan keamanan menjadi semakin kuat, dan mengakibatkan negara kuat tersebut merasa terancam; *Asymmetric Balancing*, merujuk pada

⁸ Morgenthau, H.J. *The Balance of Power*. In: Morgenthau, H.J. 1973. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred Knopf.

usaha negara bangsa dalam menyeimbangi negara kuat dengan aktor subnasional yang bertindak untuk mengancam, seperti kelompok teroris (Paul, T.V. 2004; 3).⁹

3. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep Kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton di definisikan sebagai berikut :¹⁰

“the fundamental objective and ultimate determinant that guides the decisions makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typical a highly generalize conception of these element that constitute to the state most vital needs. These include self preservation, independent, territorial integrity, military security, and economic well being.”

Self preservation diartikan Jack C. Plano dan Roy Olton sebagai hak suatu Negara untuk mempertahankan eksistensi negaranya. *Self preservation* juga dapat diartikan sebagai upaya suatu Negara untuk mempertahankan jati diri dan identitas negaranya ditengah perkembangan global, dimana eksistensi menjadi penting dalam pergaulan internasional sebagai bentuk pengakuan Negara terhadap Negara lain. Secara tidak langsung, hal ini akan menjadi penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara dalam pergaulan internasional.

Independen diartikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan suatu Negara untuk dapat menentukan nasibnya sendiri dengan tidak terikat atau terjajah oleh Negara lain. Sehingga hal ini akan dapat menentukan sikap dalam menentukan keputusan politiknya. Kemerdekaan tersebut juga dapat turut mempengaruhi kelangsungan hidup dan pengakuan suatu Negara dalam kancan internasional.

⁹ Paul, T.V., 2004. Introduction: *The Enduring Axioms of Balance of Power Theory and Their Contemporary Relevance*. In: T.V. Paul, J.J.Wirtz & M. Fortmann (eds.), 2004. *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century*. Stanford: Stanford University Press.

¹⁰Jack C. Plano, Roy Olton, *The International Dictionary*, terj. Wawan Juanda (Third Edition, Clio Press Ltd. England, 1982) hlm. 7

Territorial integrity dapat diartikan sebagai suatu integritas wilayah. Keutuhan dan kesatuan wilayah merupakan suatu bentuk kedaulatan suatu Negara. Dimana kedaulatan tersebut sebagai bentuk eksistensi dan pengakuan tertinggi atas keberadaan suatu Negara dalam kancah politik internasional. Kesatuan wilayah atau keamanan wilayah juga turut berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan politik suatu Negara yang sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan suatu Negara.

Military security atau keamanan militer, dimana hal tersebut menjadi penting bagi stabilitas dan eksistensi suatu Negara. Hal tersebut dikarenakan adanya kecenderungan bahwa Negara yang memiliki kuantitas dan kualitas persenjataan yang kuat maka Negara tersebut akan lebih memiliki *Beginning position dan Power* yang besar dimana dapat mempengaruhi posisinya dalam hubungan antar Negara.

Mengenai *Economic well-being* diartikan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi dimana kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu pilar penyokong kestabilan suatu Negara. Yang mana Kestabilan ekonomi merupakan suatu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kemajuan dan pembangunan suatu bangsa.

Dari konsep kepentingan nasional diatas, maka pada dasarnya kepentingan suatu bangsa dalam percaturan masyarakat internasional tidak terlepas dari dua tujuan utama yaitu kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan (*welfare*). Setiap negara didunia pada umumnya mempunyai tujuan untuk memajukan dan mengembangkan kepentingan ekonomi negaranya. Tujuan tersebut meliputi upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, baik secara keseluruhan/individu tersebut dapat dicapai melalui jangka pendek maupun jangka panjang. Kepentingan nasional sebuah Negara salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memajukan dan mengembangkan ekonomi negaranya.

Dari kepentingan nasional beranjak kepada perumusan formulasi kebijakan luar negeri. Perumusan ini harus memperhatikan situasi yang mencakup factor eksternal, domestik, dan kondisi kontemporer historis yang dianggap pembuat kebijakan luar negeri relevan dengan setiap masalah politik tertentu.¹¹ Adapun formulasi kebijakan luar negeri harus meliputi kejadian-kejadian penting, kebutuhan-kebutuhan politik domestik dan luar negeri, nilai-nilai sosial dan imperatif ideologis, keadaan pendapat umum, adanya kapabilitas, tingkat ancaman, kesempatan yang dirasakan dalam suatu situasi, konsekuensi yang telah diduga, biaya untuk mempersiapkan tindakan, dan elemen-elemen waktu atau tuntutan situasi tertentu.¹²

Kepentingan nasional Negara Federasi Rusia atas penjualan rudal Almaz Antei S-300 terhadap Iran juga tak luput pada kepentingan suatu bangsa Rusia sendiri. Penjualan rudal atas Iran tentunya akan mendatangkan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakatnya baik secara individu ataupun keseluruhan, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Kepentingan utama Rusia adalah untuk menumbuhkan ekonomi dalam negerinya.

Kepentingan nasional Rusia dalam mempertahankan jati diri sebagai Negara *super power* di kaca internasional adalah dengan menerapkan system pemerintahan demokrasi. Rusia yang telah merubah system pemerintahan dari otokrasi menuju demokrasi membuat Rusia harus memilih langkah yang tepat untuk semua rakyat dari berbagai kalangan di Rusia. Sehingga sebagai Negara dengan system demokrasi Rusia mempertahankan eksistensinya di dunia internasional karena Rusia juga Negara *super power*.

E. Hipotesis

Rusia menjual rudal terhadap Iran pasca kesepakatan nuklir karena ;

¹¹Holsti, K.J. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta. 1992, h.469

¹²*Ibid*

1. Dalam kepentingan nasional *Economic Well-being* adalah cara Rusia untuk memulihkan krisis ekonomi akibat sanksi ekonomi Barat, terutama AS, atas Rusia serta adanya hubungan dan kesepakatan antara Rusia- Iran yang melakukan tukar barang dan minyak mentah “barter” atas kebijakan pengiriman dan memasok peralatan dan material konstruksi ke Iran untuk ditukarkan dengan minyak mentah di bawah kesepakatan.
2. Kepentingan nasional *Military Security* adalah cara Rusia untuk mempertahankan jati diri negaranya ditengah kaca internasional, terutama AS dan Iran bahwa Rusia memiliki kuantitas dan kualitas persenjataan yang kuat.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang :

1. Kebijakan Rusia dalam kerjasama program reactor nuklir Iran.
2. Perkembangan hubungan Rusia dengan Iran dari awal kerjasama sampai sampai tahun 2005.
3. Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan dengan menggunakan fakta – fakta yang memanfaatkan data sekunder yang di peroleh melalui buku – buku, jurnal – jurnal, surat kabar, website dan tulisan – tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

Sedangkan tehnik pengumpulan data yang di gunakan yaitu melalui penelitian pustaka (*library research*) yang memanfaatkan data–data atau bahan–bahan yang ada di perpustakaan

untuk mendukung penelitian yang di peroleh dari buku-buku, majalah, koran, website dan bahan – bahan lain yang sesuai dengan topik yang akan di teliti dan dapat di uji kebenarannya.

H. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat waktu dimulainya program nuklir Iran tahun 1995 yang disponsori oleh Rusia selama 10 tahun yaitu tahun 2005. Subyek pada penelitian ini adalah Negara Rusia, Iran, Amerika Serikat dan Israel dengan topik utamanya adalah kebijakan Rusia dalam kerjasama program nuklir Iran yang membuat Amerika Serikat dan Israel khawatir akan pertahanan Iran yang semakin kuat.

I. Sistematika Penulisan

BAB I berisi garis besar penelitian meliputi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan bab-bab selanjutnya

BAB II menceritakan tentang dinamika politikluar negeri Rusia sejak zaman Tsar, Uni Soviet sampai Federasi Rusia

BAB III menceritakan berbagai sikap Rusia mendukung Iran dalam konteks nuklir tahun 1995-2005

BAB IV menganalisis kebijakan Rusia dalam kerjasama program nuklir Iran

BAB V merupakan bagian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah.